

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggung jawaban atas proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, anggaran sampai pelaksanaan anggaran, fenomena masalah dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat peningkatan dalam perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di kutip dari (BPK RI, 2021). Meskipun demikian, muncul pertanyaan mengenai dampak nyata dari opini audit ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyak pihak menganggap bahwa peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan seharusnya berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pendapat dari (Muhammad Hendartyo, 2020) yang menyatakan perolehan opini WTP merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah untuk senantiasa mengelola keuangan dan akuntabel sehingga memberikan hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang meraih opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan untuk kedelapan kalinya, “Alhamdulillah kami menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2023 dari BPK. Ini merupakan ke delapan kalinya Pemkot Semarang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” dari mantan wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu berita ini disiarkan oleh (Berita Pemkot, n.d.).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan publik yang transparan, opini audit yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kepatuhan dan ketepatan pengelolaan anggaran. Dalam konteks ini, opini audit tidak hanya berfungsi sebagai penilaian kualitas laporan keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri, menurut pendapat dari (Perbendaharaan et al., n.d.-a). Laporan keuangan yang baik dan opini audit yang positif sering kali diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang dapat berimplikasi pada partisipasi publik dalam program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Jika menurut Ria, (2017) sebaiknya laporan keuangan yang buruk dan opini audit yang negatif dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi partisipasi masyarakat dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji pengaruh opini audit terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana opini audit dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan penilaian tersebut untuk memperbaiki pengelolaan keuangan.

Mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode Maret 2023 hingga September 2024, terlihat adanya dinamika yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin meningkat dari 485.511 jiwa pada Maret 2023 menjadi 517.415 jiwa pada Maret 2024, dan kembali naik menjadi 532.913 jiwa pada September 2024, dengan laju kenaikan sebesar 3,00%. Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 469.003 jiwa pada Maret 2023 menjadi 495.627 jiwa pada Maret 2024, kemudian naik lagi menjadi 508.298 jiwa pada September 2024, dengan persentase kenaikan 2,56%. Secara

keseluruhan, baik di perkotaan maupun perdesaan, jumlah penduduk miskin meningkat dari 477.580 jiwa pada Maret 2023 menjadi 507.001 jiwa pada Maret 2024, serta bertambah menjadi 521.093 jiwa pada September 2024, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,78%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan persentase kenaikan antara perkotaan dan perdesaan, tren umum yang terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2023–2024 (Sensus Ekonomi Provinsi Jawa Tengah, 2026).

Capaian domain kesehatan dan kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah periode 2021 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai capaian berada pada angka 45, kemudian meningkat signifikan menjadi 55 pada tahun 2022, dan kembali naik mencapai 62,5 pada tahun 2023 (Kemenpora, 2024). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan akses layanan kesehatan, kebijakan pemerintah daerah yang proaktif, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan (Nurjanah et al., 2024). Kenaikan capaian tersebut menggambarkan bahwa upaya pembangunan di sektor kesehatan di Jawa Tengah berhasil mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Hubungan antara opini audit laporan keuangan pemerintah daerah dengan kesejahteraan masyarakat menjadi isu yang banyak diperbincangkan, terutama seiring dengan peningkatan kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan melalui perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Adinata et al., 2023). Namun demikian, terdapat pandangan kritis yang menyatakan bahwa pencapaian opini WTP tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prahatiwi et al., (2024) yang menegaskan bahwa opini audit laporan keuangan semestinya tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi, melainkan juga perlu diikuti dengan evaluasi atas realisasi program pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa IPM sebagai kesejahteraan masyarakat karena secara substansi telah mencakup ukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dan salah satu ukuran kesejahteraan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa apakah indeks pembangunan manusia dan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pernyataan ini dikutip dari penelitian (Perbendaharaan et al., n.d.-a) dan menurut penelitian terdahulu penelitian ini menggunakan variabel independen berupa rekomendasi temuan audit dengan indeks opini dan variabel tindak lanjut dengan skor opini juga diperlukan untuk menggambarkan perbaikan temuan yang telah lalu, menurut (Purba, 2017). Indeks pembangunan manusia memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan digunakan untuk menilai kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian sejenis terkait pengaruh opini audit telah dilakukan peneliti terdahulu diantaranya oleh Fatimah Az Zahrah et al., (2023) dan Nazhila & Amin, (2024) yang juga menggunakan proses kuantitatif data untuk menguji secara statistik. Untuk mendapatkan indeks pada suatu provinsi perlu dijumlah terlebih dahulu dari kabupaten dan kota, kemudian di rata rata kan terakhir dibulatkan, hasil perhitungan digunakan untuk perbandingan antara entitas daerah yang memperoleh opini WTP dalam frekuensi yang lebih banyak dan berturut turut. Keterkaitan variabel kesejahteraan masyarakat,

salah satu tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, Menurut Reis, (2018) kesejahteraan masyarakat merupakan konsep yang luas dari status ekonomi dan diukur dengan indikator multidimensi termasuk kesehatan dan pendidikan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya baik seperti makan dan tempat tinggal maupun kebutuhan taraf hidup yang layak.

Menurut penelitian Akbar & Djazuli, (2015) kinerja keuangan pemerintah daerah mempunyai korelasi kuat terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berkorelasi signifikan terhadap opini BPK dan opini BPK tidak berkorelasi kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika menurut penelitian Saragih & Hasibuan, (2020) opini audit berkorelasi positif dan signifikan atas kinerja keuangan pemerintah. Menurut Fatimah Az Zahrah et al., (2023) secara parsial temuan pemeriksaan BPK ukuran pemerintahan dan realisasi belanja berkorelasi signifikan atas kinerja pemerintah daerah. Menurut Ramadhani et al., (2024) pemerintah Kota Kediri memperoleh opini WTP dari hasil audit BPK yang menunjukkan pelaporan keuangan yang efektif mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut penelitian terdahulu Marwanto & Pramono, (2023) audit sosial meningkatkan kinerja kesejahteraan masyarakat dengan mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif dalam implementasi, khususnya di blok pembangunan suku Bharmaur teknik pengambilan sampel multistage responden sampel yang berkinerja. Menurut pendapat Ram & Sharma, (2023) opini audit pemerintah daerah tentang kinerja kesejahteraan masyarakat berfokus pada upaya penanggulangan kemiskinan dan indikator kesejahteraan di Kabupaten Bondowoso. Metode kualitatif akar penyebab kemiskinan tetap tidak terpecahkan meskipun ada program, integrasi dan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan yang rendah memengaruhi efektivitas, pendapat ini menurut peneliti dari (Wulandari & Rosfiantika, 2018).

Pentingnya audit dan evaluasi dalam memastikan kepatuhan dan pengelolaan dana yang efektif secara langsung memengaruhi kinerja kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Tantangan transparansi dalam alokasi dana mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan lokal yang pada gilirannya mendukung akuntabilitas pemerintah dan alokasi sumber daya yang pada akhirnya menguntungkan kesejahteraan masyarakat, pernyataan ini disebutkan oleh (Freitasl & Costa, 2022). Analisis pada efek jenis pendapatan, perlunya eksplorasi lebih mendalam tentang dampak audit yang di nyatakan berdasarkan penelitian dari (Rini & Mimba, 2019). Opini audit pemerintah daerah dan kinerja kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan bahwa opini audit tidak secara efektif memprediksi tingkat kesejahteraan publik, opini BPK tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat, menurut pendapat dari (Saragih & Hasibuan, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara pencapaian opini audit dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun opini audit, khususnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sering dijadikan indikator keberhasilan tata kelola keuangan daerah, temuan audit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) justru menunjukkan masih adanya kelemahan dan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana opini audit benar-benar mencerminkan kualitas tata kelola dan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh opini audit terhadap IPM, dengan harapan dapat menjelaskan apakah pencapaian opini audit berimplikasi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memberikan masukan bagi perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah agar lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah perolehan opini audit berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan mampu mencerminkan tata kelola keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah sehingga menghasilkan hasil laporan keuangan yang optimal yang berujung pada kesejahteraan masyarakat, temuan audit adanya ketidaksesuaian dan adanya perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Dari temuan audit dalam LHP LKPD yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, akan memberikan rekomendasi temuan audit yang akan memperbaiki tata kelola keuangan yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kinerja pemerintah, semakin buruk kinerja pemerintah daerah, semakin banyak pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin buruk juga kinerja pemerintah daerah tersebut, menurut pendapat dari (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi teoritis dapat berkontribusi dalam pengembangan teori dan pengetahuan akuntansi yang berfokus pada akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Menurut pendapat Arens et al., (2017) hubungan keagenan mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadi asimetris informasi dan terjadi konflik kepentingan, adanya asimetris informasi yang berdampak pada penyelewengan pemerintah. Menurut Endiana & Suryandari, (2021) hal-hal yang merugikan untuk mencapai keinginannya, seperti salah saji atau kecurangan. Bagi Praktis, bermanfaat untuk masyarakat sebagai gambaran mengenai pengaruh opini audit pemerintah daerah dan faktor audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, untuk sektor usaha di daerah supaya lebih mengerti tentang keuangan pemerintah.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Grand Theory*)

Teori keagenan dapat dipahami sebagai suatu kontrak yang melibatkan principal dan agent, di mana terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian (Chekiani dan Prasetyo, 2023). Menurut Sutisna et al., (2024), pemilik modal (*principal*) berperan sebagai investor yang memberikan kewenangan kepada agen, yakni manajer, untuk mengelola asetnya. Investor berharap melalui pengelolaan tersebut akan tercapai peningkatan keuntungan serta kesejahteraan bagi para pemegang saham. Adanya perbedaan tujuan antara pemilik modal dan manajer dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pemilik lebih menekankan pada peningkatan return dan nilai sekuritas dari investasinya, sedangkan manajer cenderung menginginkan kesejahteraan pribadi, termasuk kompensasi yang lebih tinggi. Untuk itu, kontrak yang disusun antara kedua pihak diharapkan mampu mengurangi konflik kepentingan yang muncul.

Dalam perspektif teori agensi, isu ini menjadi landasan penting dalam memahami corporate governance. Pemisahan kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agent berpotensi memunculkan konflik keagenan. Jensen dan Meckling (1976) dalam

menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis akuntansi diharapkan mampu meminimalisir konflik, sebab laporan tersebut berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja agen yang memungkinkan principal menilai, mengukur, dan mengawasi sejauh mana agen bekerja demi kesejahteraan mereka, serta sebagai dasar pemberian kompensasi.

Lebih lanjut, teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan masalah *principal-agent* terkait pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana pemilik (*principal*) mendelegasikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan jasa tertentu atas nama mereka, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Struktur kepemilikan kemudian mencerminkan variasi pola kepemilikan saham baik oleh pemegang saham internal maupun eksternal. Menurut Sartika et al., (2024), terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepemilikan saham oleh manajemen, meskipun dalam jumlah kecil, dapat memengaruhi kecenderungan manajer untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibandingkan hanya berfokus pada tujuan perusahaan.
- b. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi memberi dorongan kepada pemegang saham mayoritas untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dan mengawasi jalannya perusahaan.
- c. Identitas pemilik akan menentukan prioritas tujuan sosial perusahaan.
- d. Maksimalisasi nilai pemegang saham, di mana perusahaan milik pemerintah cenderung lebih diarahkan pada pencapaian tujuan politik dibandingkan dengan tujuan perusahaan semata.

2.2 Definisi Konsep Variabel

2.2.1. Opini Audit, Opini audit memiliki peran dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering dikaitkan dengan tata kelola keuangan yang baik, menurut penelitian (Rukmini et al., (2024). Opini WTP mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. Beberapa penelitian empiris juga mengungkapkan hubungan positif antara opini audit WTP dengan kinerja fiskal pemerintah daerah. Salah satunya menunjukkan bahwa daerah yang secara konsisten mendapatkan opini WTP cenderung memiliki belanja publik yang lebih efektif yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Selain itu, menurut peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa opini WTP sering menjadi indikasi perbaikan sistem pengendalian internal yang efektif yang dapat mencegah penyalahgunaan anggaran, pendapat ini dinyatakan oleh (Martadinata, 2024).

2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat pembangunan manusia di berbagai negara. IPM menggabungkan tiga variabel utama yaitu kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, pendidikan yang dihitung berdasarkan angka harapan sekolah dan lama rata rata sekolah & standar hidup yang diukur melalui produk nasional bruto perkapita yang di sesuaikan dengan daya beli. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun

kualitas hidup manusia yang dilansir dari (Wikipedia, n.d.-a). Meningkatkan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang di sesuaikan, menurut pendapat dari (Statistik & Semarang, 2022).

2.2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan bermanfaat. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator, proses pembuatan laporan keuangan pemerintah ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya, perbedaannya hanya di jurnal eliminasi, pendapat ini di nyatakan oleh (Rodríguez, Velastequí, 2019).

2.3. Hipotesis / Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Opini Audit Laporan Keuangan,

Opini audit laporan keuangan ada pada sektor publik, seperti yang dilakukan oleh Ramdani, (2022) yang melakukan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit mengacu pada fee audit, masa jabatan audit, rotasi audit. Menekankan pentingnya transparansi yang menunjukkan opini WTP mampu mengelola keuangan dengan baik yang dapat berkontribusi pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perolehan opini WTP secara berturut – turut mempunyai pengaruh yang baik terhadap IPM, kesejahteraan masyarakat adalah keadaan dimana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi mulai dari pertumbuhan, pendapatan perkapita dapat meningkat, sementara pendapatan perkapita memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan telah diamati secara teratur oleh (Marwanto & Pramono, 2023) bahwa entitas sektor publik secara konsisten membuktikan kesiapan untuk memenuhi kewajiban.

Ukuran sampel kecil pada penelitian sebelumnya dan periode observasi singkat pada penelitian sebelumnya, dampak opini audit terhadap kesejahteraan publik dari waktu ke waktu dan dampak temuan audit terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menurut penelitian dari (Perbendaharaan et al., n.d.-a). Jika menurut pendapat dari Idrus et al., (2018) menggali efektivitas rekomendasi BPK tentang pencegahan korupsi, menyelidiki dampak sistem pengendalian internal terhadap integritas pelaporan keuangan. Hubungan antara opini audit dan karakteristik pemerintah daerah, divisi regional menunjukkan manajemen keuangan yang lebih lemah daripada daerah induk menurut pendatan dari (Mada, n.d.)

Opini audit laporan keuangan pemerintah daerah yang baik Wajar Tanpa pengecualian(WTP) berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pernyataan ini menegaskan semakin baik opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan.

2.3.2. Perolehan Opini Audit dan Indeks Pembangunan Manusia

Perolehan opini audit laporan keuangan yang berkualitas ditunjukkan melalui opini WTP suatu laporan keuangan dari BPK mencerminkan tata keola keuangan yang baik, memungkinkan bahwa alokasi anggaran yang lebih efektif dan afisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan indikator pembangunan manusia, pendapat ini menurut (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Menurut pendapat dari Nugroho, (2018) menemukan bahwa opini WTP memiliki hubungan yang signifikan terhadap indeks pembangunan daerah. Menurut pendapat Aggatha et al., (2023) jumlah pemerintah daerah yang memperoleh capaian opini WTP semakin banyak dan bahkan ada daerah yang memperoleh secara berturut-turut, selain mencerminkan kualitas tata kelola yang semakin baik, capaian nya menandakan sudah menjadi budaya yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengawal tercapainya kesejahteraan masyarakat, berdasarkan asumsi atas hipotesis dengan menguji dampak opini WTP secara berturut-turut terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diajukan pengembangan dengan uraian sebagai berikut:

H1 : Perolehan opini berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

2.3.3. Temuan Audit dan Indeks Pembangunan Manusia,

Temuan audit adalah hasil dari pemeriksaan badan pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, temuan ini dapat berupa ketidaksesuaian dalam penyajian laporan, tidak efektif dalam pengelolaan anggaran hingga indikasi penyimpangan dan kecurangan, adanya ketidak patuhan perundang – undangan sebagai contoh penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peraturan, kelemahan pengendalian internal atau masalah pada mekanisme pengawasan anggaran, menurut pendapat dari RAI, (2008). Menurut pendapat Najah, (2019) jika nilai dari penyimpangan audit yang didapat pada periode sebelumnya bernilai besar, maka diharapkan pada periode selanjutnya terdapat perubahan yang lebih baik oleh pemerintah dalam mengurangi penyimpangan tersebut sehingga berakibat hasil yang baik pada pengungkapan atas laporan keuangan.

Jika menurut pendapat dari Sutopo et al., (2017) menemukan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, semakin banyak temuan audit, semakin rendah tingkat kesejahteraan, jika nilai tingkat penyimpangan audit yang didapat pada periode sebelumnya besar, maka dapat mengindikasikan bahwa pengungkapan pada laporan keuangan pada tahun tersebut juga rendah. Hubungan negatif antara ketidakefisienan pengelolaan keuangan dengan IPM, temuan audit yang tinggi mengindikasikan ketidakefisienan, menurut pendapat dari (Agus & Safri, 2016). Menurut Martani & Setyaningrum, (2015) membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini audit artinya semakin besar temuan audit maka peluang dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian menjadi semakin kecil, hal ini disebabkan karena temuan yang material akan berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan yang menyebabkan salah saji sehingga opini menjadi semakin buruk.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan pengembangan dengan uraian sebagai berikut:

H2 : Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.3.4. Rekomendasi Tindak Lanjut dan Indeks Pembangunan Manusia,

Dampak atas adanya upaya perbaikan dari temuan audit dan perolehan opini pada suatu periode terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, laporan audit yang lebih berkualitas dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia, tindak lanjut dari laporan audit yang efektif dapat memperbaiki kinerja pemerintah dalam menyediakan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Instansi pemerintah melalui dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu secara konsisten menerapkan rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi, menurut pendapat dari Purba, (2017).

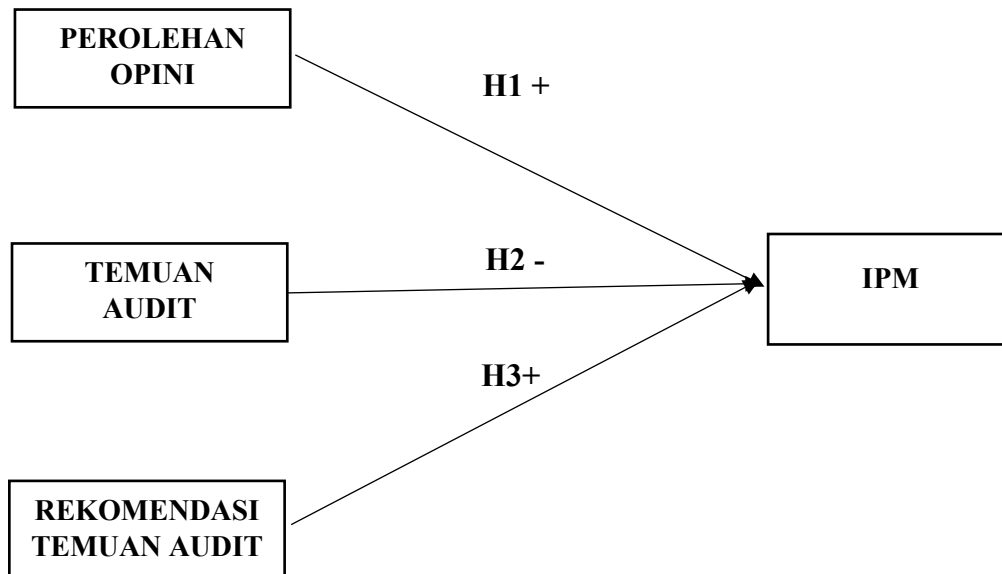
Kualitas hidup masyarakat yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan pelayanan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi yang berkelanjutan, dengan mengaitkan rekomendasi temuan audit laporan audit dengan upaya peningkatan indeks pembangunan manusia, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif antara pengelolaan keuangan yang baik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di pendapat ini di dapat dari (Perbendaharaan et al., n.d.-a). Menurut penelitian terdahulu Turangan et al., (2016) menemukan bahwa kualitas rekomendasi audit dan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan audit berpengaruh positif terhadap komponen indeks pembangunan manusia (IPM), karena ada meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, perbaikan layanan masyarakat dan program kemiskinan. Rekomendasi temuan audit akuntabilitas penggunaan dana publik, pendapat ini menurut (Jasmine, 2014). Jika efektif dalam pengelolaan keuangan daerah berdampak pada pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran untuk program pembangunan manusia, penurunan kebocoran anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan dan peningkatan akuntabilitas penggunaan dana publik, pendapat ini menurut (Jasmine, 2014). Jika menurut Verawaty, (2019) pengaruh BPK karakteristik pemerintah dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dapat diajukan pengembangan dengan uraian sebagai berikut :

H3 :Rekomendasi Temuan Audit berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4. Model Penelitian

Model Penelitian ini menggunakan model regresi data panel jenis kriteria data yang digunakan perpaduan antara data antarwilayah dan data antar waktu.



Gambar 1 Model Penelitian

Berdasarkan bentuk umum gambar model penelitian maka bentuk model panel dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX + \epsilon$$

Y = Indeks Pembangunan Manusia
X = Opini Audit
a = nilai perbedaan antar wilayah
b = konstanta
 ϵ = residual regresi atau kesalahan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.1 Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini ialah data Opini audit pemerintah daerah Jawa Tengah dengan lama pengamatan 4 tahun dari tahun 2020 – 2023. Data kesejahteraan masyarakat yang digunakan sebagai variabel dependen adalah data IPM tahun 2020 – 2023 sedangkan data variabel independen yang digunakan adalah data opini LKPD Jawa Tengah tahun 2020 – 2023 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa opini tahun 2020 sampai dengan 2023 wajar tanpa pengecualian, Sumber data merupakan sumber data sekunder dan diperoleh dari beberapa sumber data IPM diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan data opini laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dari LHP LKPD

yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan data temuan audit dan tindak lanjut diperoleh dari LHP LKPD yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Sampel

Sampel penelitian ini diambil dengan *teknik purposive*, sampel berdasarkan kriteria individu tertentu atau kelompok yang memiliki karakteristik khusus seperti relevansi terhadap tujuan topik penelitian, pengalaman yang terkait seperti proses audit laporan keuangan dan mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif.

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder. Teknik pengumpulan data secara sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data opini audit dari tahun 2020 sampai 2023 dan data terkait kesejahteraan masyarakat diidentifikasi sumber data dari laporan keuangan pemerintah daerah, data indeks pembangunan manusia serta data opini LHP dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, data yang dikumpulkan ialah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah termasuk LHP dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Setelah data terkumpul pengolahan data menggunakan metode analisis seperti regresi data panel untuk menguji hubungan antara opini audit dengan kesejahteraan masyarakat.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian pendapat ini menurut, (Tanjung & Maryana, 2021)

- a. Menurut Tanjung & Maryana, (2021) Studi kepustakaan dimaksudkan untuk menelusuri literatur dan penelitian terdahulu. Tujuan ini dilakukan supaya peneliti dapat belajar secara lebih sistematis tentang cara menulis karya ilmiah, serta menganalisis suatu permasalahan penelitian.
- b. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang digunakan adalah data opini LHP dari BPK Perwakilan Provinsi di Jawa Tengah yang dipublikasikan di situs website resmi BPK.

3.3 Definisi Operasional Variabel Opini Audit Laporan Keuangan

Penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk dalam salah satu pengelolaan keuangan pemerintah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan harus melampirkan dokumen yang menyajikan informasi keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu. Menurut Aggatha et al., (2023) ada beberapa indikator yang terdapat pada opini audit laporan keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini yang tidak memberikan pendapatan (TMP), Opini Tidak Wajar atau *Dissclimer*. Variabel ini di peroleh dari LHP LKPD yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk memperoleh data yang tidak

langsung atau data sekunder dengan cara mengirimkan permohonan izin untuk permintaan data LHP LKPD Jawa Tengah untuk tahun 2020 – 2023.

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya, dalam laporan itu auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan audit. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku, penjelasan ini di nyatakan oleh (Rodhiyah, 2019). Nilai dari perolehan opini dihitung menggunakan akumulasi opini audit. Beberapa penelitian sejenis terkait pengaruh opini audit telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah Fatimah Az Zahrah et al., (2023) yang juga menggunakan kuantitatif data untuk pengujian, yaitu opini dengan kategori tidak wajar 0, tidak memberikan pendapat atau disclaimer 1, wajar dengan pengecualian 2, dan wajar tanpa pengecualian 3.

Temuan Audit

Temuan audit merupakan hasil evaluasi dari bukti yang dikumpulkan terhadap kriteria audit, temuan audit dapat mengindikasikan baik kesesuaian maupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Temuan audit ditemukan karna kurangnya pengendalian internal sehingga adanya penyimpangan dari ketentuan perundang – undangan, kecurangan serta ketidak patuhan menurut pendapat dari (Rodríguez, Velastequí, 2019). Hasil evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit yang mengindikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian, kesesuaian mencakup bukti audit yang mendukung dan pernyataan dalam audit yang sesuai, jika ketidaksesuaian umumnya temuan audit yang tidak relevan antara laporan keuangan dengan bukti yang ada, jika di temukan adanya ketidaksesuaian dalam temuan audit maka segera di konfirmasi bahwa ada ketidaksesuaian jangan memperhalus untuk menyatakan hal lain dan harus didokumentasikan dengan rinci untuk memastikan audit menemukan dengan tepat apa yang di observasi oleh auditor, disajikan oleh (*Temuan Audit*, 2020).

Temuan Audit ini guna melihat upaya suatu instansi dalam melakukan perbaikan, menurut salah satu peneliti terdahulu, temuan audit dengan cara perhitungan menggunakan interaksi antar variabel dikalikan dengan perolehan opini, Data nya menggunakan LHP LKPD yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sampai tahun 2023 pendapat ini dikeluarkan oleh (Perbendaharaan et al., n.d.-b).

Rekomendasi Temuan Audit

Rekomendasi temuan audit selama proses audit mengarah pada peningkatan kinerja didasarkan pada pemeriksaan yang ditujukan kepada entitas atau badan yang berwenang melakukan tindakan perbaikan. Dalam penelitiannya Salsabila & Wahyudi, (2022) menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dapat merekomendasikan yang kurang dalam mencatat laporan keuangan dalam kepatuhan pengendalian internal yang mungkin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan menyatakan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menurunkan rekomendasi auditor. Rekomendasi menjadi perbandingan untuk para pengguna dalam mengambil keputusan untuk mengetahui kinerja suatu badan, melalui rekomendasi ini auditor dapat memberikan saran kepada manajemen secara lebih rinci tentang masalah yang ada.

Untuk mengukur data penelitian ini rekomendasi temuan audit interaksi persentase tindak lanjut rekomendasi temuan audit dengan perolehan opini audit, menurut pendapat

dari (Perbendaharaan et al., n.d.-b) yang dimaksud untuk mengetahui dampak atas perbaikan dengan capaian opini secara tahunan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk memperbesar pilihan bagi penduduk bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan saja, sebagai pandangan dari Rochdi, (2009). IPM dipakai juga dalam menentukan level pembangunan wilayah guna menentukan langkah kebijakan yang akan diambil. Ada beberapa hal yang terdapat pada indeks pembangunan manusia diantaranya, kesejahteraan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan angka harapan hidup dan untuk mengukur suatu individu disuatu daerah adalah rata rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup, menggunakan pendekatan tak langsung dan menggunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP. Untuk menghitung indeks pembangunan manusia data indeks pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) satuannya angka indeks, Common effect model, merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel yaitu dengan mengkombinasikan data *cross section* dan 15 *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Berikut rumusnya $Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$ pendapat ini merupakan pendapat dari (Susantun & Riana, 2002).

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel merupakan metode analisis data kuantitatif yang digunakan, menurut Nurhaswinda et al., (2025) regresi data panel adalah metode regresi yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Dengan menggabungkan data tersebut akan menghasilkan data yang lebih informatif, lebih beragam, memiliki interdependensi antar variabel yang lebih kecil, dan lebih efektif, dan untuk menganalisa data, penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan *algoritma machine learning*, *analisis string*, serta analisis *big data* yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Dalam penelitian ini, metoda pengolahan data menggunakan komputer dengan software SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*) versi 26, SPSS digunakan untuk bertujuan dalam mendapatkan hasil perhitungan yang akurat serta cepat dalam pengolahan data.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian, termasuk nilai rata rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel. Menurut Tanjung & Maryana, (2021) bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tendensi sentral merupakan ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai sentral dari distribusi data penelitian. Tendensi sentral dapat dinyatakan dengan tiga macam ukuran,

yaitu: rata-rata (mean), median, dan modus yang masing-masing mengukur nilai sentral dalam pengertian yang berbeda, pendapat ini dari (Nurhaswinda et al., 2025)

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Mardiatmoko, (2020) uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastis pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastis. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Uji Asumsi Klasik meliputi :

1. **Uji Normalitas**, Menurut Mardiatmoko, (2020) uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak, model regresi yang baik yaitu memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa data distribusi normal atau tidak, maksud dari data distribusi normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal dengan bentuk data memusat pada nilai rata rata atau nilai tengah, pendapat yang lansir dari (Qurnia Sari et al., 2017).
2. **Uji Multikolinearitas**, Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara peubah bebas X dalam model regresi ganda. jika hubungan linear antar peubah bebas X dalam model regresi ganda adalah korelasi sempurna maka peubah-peubah tersebut berkolinearitas ganda sempurna, dilansir dari (Wikipedia, n.d.-b) sebagai ilustrasi, misalnya dalam menduga faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi per tahun dari suatu rumah tangga, dengan model regresi ganda sebagai berikut:
$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + E$$

 X_1 : pendapatan per tahun dari rumah tangga dan X_2 : pendapatan per bulan dari rumah tangga
3. **Uji Heteroskedastisitas**, Menurut, Mardiatmoko, (2020) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain, jika nilai $p\text{-value} \geq 0,05$ maka H_0 diterima, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan jika nilai $p\text{-value} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas.
4. **Uji Koefisiensi Determinasi**, Uji R^2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diuji.

3.4.3. Uji Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel. Data panel adalah data yang dikumpulkan secara *cross section* dan diikuti pada periode waktu tertentu. Teknik data panel yaitu dengan menggabungkan jenis data *cross section* dan *time series*. Menurut Institusional et al., (2020) data panel merupakan gabungan antara dua kurun waktu *time series* dan data silang *cross section* keunggulannya data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu, data panel dapat digunakan untuk menguji , membangun dan mempelajari model-model perilaku yang kompleks, data panel dapat

mendeteksi lebih baik dan mengukur dampak yang secara terpisah di observasi dengan menggunakan data *time series* ataupun *cross section*. Uji Analisis Regresi Data Panel meliputi :

1. **Uji F**, Menurut Nurhaswinda et al.,(2025) uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau untuk menguji apakah model regresi yang dibuat adalah signifikan atau tidak. Jika model signifikan, maka model tersebut bisa digunakan untuk prediksi. Sebaliknya, jika tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk memprediksi.
2. **Uji t**, Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimanakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Alat uji yang digunakan adalah koefisien korelasi parsial atau koefisien regresi berganda. Koefisien tersebut merupakan alat uji untuk mengetahui dan mengukur variabel-variabel independen yang mempunyai keeratan pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial, pendapat ini di keluarkan oleh (Nurhaswinda et al., 2025).